

ADAPTIF BERNILAI MEMBANGUN BANUA



PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENGENDALI BANJIR

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PE.02.03/LHP-1/PW16/6/2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024



**LAPORAN KINERJA
2023**

ADAPTIF BERNILAI MEMBANGUN BANUA



**BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

PE.02.03/LHP-1/PW16/6/2024

TANGGAL 5 JANUARI 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian Penuh 100% pada Tiga Indikator Kinerja dalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA/DAERAH



Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, antara lain Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran atas APBD Pemerintah Daerah, Evaluasi atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Audit PKKN.

Sasaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional Tercapai 100%

PEMBANGUNAN NASIONAL



Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target, antara lain kegiatan Evaluasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional, Evaluasi atas Akselerasi Sektor Kepariwisata melalui Program Sungai Martapura Asri dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Provinsi Kalimantan Selatan

Kesadaran Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

TATA KELOLA PEMERINTAHAN



Kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan kepercayaan mitra terhadap hasil audit BPKP mendukung capaian kinerja ini.

Pencapaian Penuh 100% pada Tiga Indikator Kinerja dalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

PEMBANGUNAN BADAN USAHA

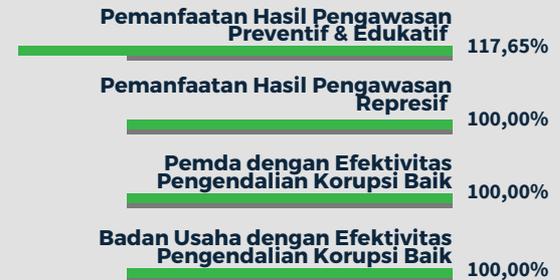


Alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan serta komitmen dari pengelola Badan Usaha untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Berhasil Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Korupsi

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kepercayaan mitra terhadap hasil audit BPKP dan kompetensi pegawai dalam melakukan penugasan terkait peningkatan efektivitas pengendalian korupsi.

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI



Pencapaian 75% pada 12 Indikator Kinerja dalam Kegiatan Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU menunjukkan sebanyak sembilan dari dua belas indikator kinerja (75%).

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan:

1. Mendampingi proses persiapan, penilaian mandiri, dan penjaminan kualitas pada SPIP Terintegrasi
2. Mendampingi proses pelaksanaan manajemen risiko pemerintah daerah.
3. Melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran serta pendampingan optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

KUALITAS PENGENDALIAN INTERN



Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Meningkat

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Pelayanan “Ketatausahaan” Unit Kerja menunjukkan sebanyak tujuh indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Adanya keteladanan Pimpinan dan iklim kerja yang memungkinkan penerapan integritas oleh Pegawai.
2. Adanya pembangunan kompetensi SDM secara terus menerus.
3. Penerapan sistem kendali mutu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

TATA KELOLA UNIT KERJA



PENGANTAR

Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, sebagai bagian dari tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2024.

Laporan ini merupakan wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan kepada mitra kerja dan masyarakat dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, yang diarahkan untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hal ini digunakan sebagai bahan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja di lingkungan BPKP terus melakukan transformasi pengawasan dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mencapai target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Namun demikian, beberapa indikator memerlukan usaha yang lebih gigih untuk mencapainya.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bukti komitmen dan dukungan aktif dari seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan kerja sama yang baik dengan seluruh mitra kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kami terus memiliki komitmen yang tinggi agar **BPKP Adaptif Bernilai** untuk mewujudkan pembangunan nasional dan wilayah yang berkeadilan.

Banjarbaru, 5 Januari 2024
Plt. Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan,

Rudy M. Harahap

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Pengantar	iii
BAB I Pendahuluan	
A. Tugas dan Fungsi	2
B. Struktur Organisasi	4
C. Aspek Strategis Organisasi	6
D. Kegiatan dan Layanan Produk BPKP	8
E. Sistematika Laporan	9
BAB II Rencana Kinerja	
A. Target Kinerja Tahun 2020-2024	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	18
B. Capaian Kinerja dan Analisis Efisiensi	19
C. Akuntabilitas Keuangan	59
D. Kinerja Lainnya	61
BAB IV Penutup	63

BAB I

Pendahuluan

- A** Tugas dan Fungsi
- B** Struktur Organisasi
- C** Aspek Strategis Organisasi
- D** Kegiatan dan Layanan Produk BPKP
- E** Sistematika Laporan

Dalam kedudukannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Secara khusus, kedudukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.

Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.



B. STRUKTUR ORGANISASI

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal di daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan, yakni Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si. NIP 19700818 199103 1 002 berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-588/K/SU/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Pada masa transisi, tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan pejabat definitif, pelaksanaan tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Rudy M. Harahap, Ph.D., CGCAE, CRGP NIP 19690404 198903 1 001 berdasarkan Surat Perintah Kepala BPKP Nomor KP-01.04/PRIN-975/K/SU/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.

Struktur organisasi terbaru Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP terdiri dari:

1. Kepala Perwakilan.
2. Bagian Umum, Sub Koordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

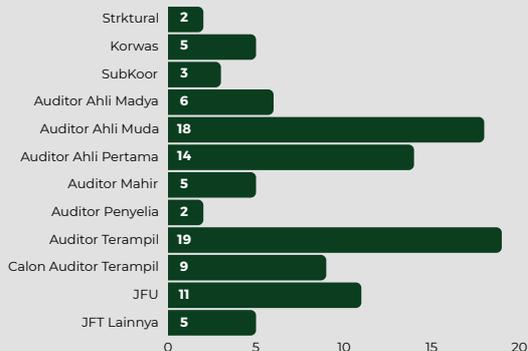
Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2021 terdapat perampingan jabatan struktural di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pejabat fungsional, yaitu:

1. Subbagian Umum menjadi Subkoordinator Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda.
2. Subbagian Kepegawaian menjadi Subkoordinator Analis SDM Aparatur Muda.
3. Subbagian Keuangan menjadi Subkoordinator Analis Pengelola Keuangan APBN Muda.

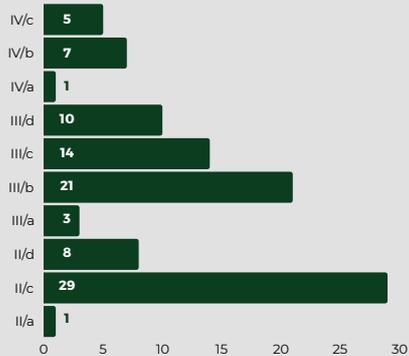
Sumber Daya Manusia Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan per 17 Desember 2023 sebanyak 99 orang dengan rincian:

Gambar 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia

BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN

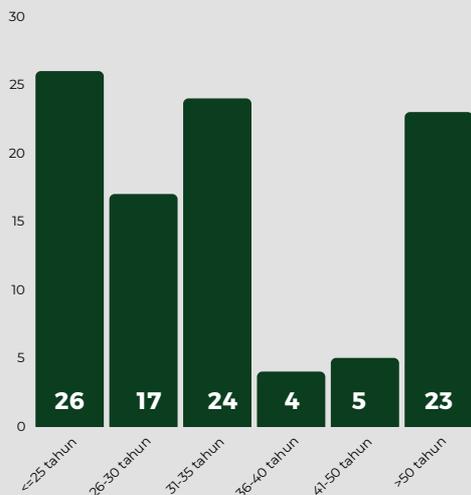


BERDASARKAN GOLONGAN

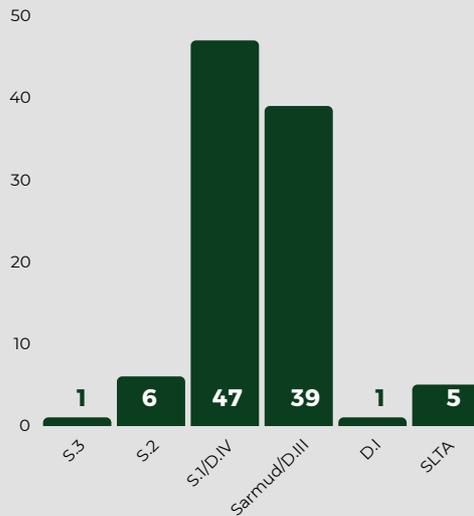


Komposisi SDM didominasi oleh pegawai yang berusia kurang dari 35 tahun

BERDASARKAN USIA



BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi BPKP merupakan pendekatan pemecahan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan intern. Hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP mendapatkan amanah untuk melakukan pengawasan intern dan pembinaan SPIP.

Arah Kebijakan Pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja di lingkungan BPKP menetapkan arah kebijakan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 yang selaras dengan arah kebijakan BPKP dengan mempertimbangkan tantangan dan permasalahan terkait upaya pencapaian sasaran strategis BPKP, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan negara dan daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas badan usaha;
4. Meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi;
5. Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada Pemda dan badan usaha; dan
6. Meningkatnya kualitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.



Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP:

Gambar 1.2 Strategi atas Arah Kebijakan



Pelaksanaan strategi tersebut berupa kegiatan pengawasan yang dimuat dalam dokumen perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan dokumen penganggaran (RKA-KL) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK BPKP

Gambar 1.3 Kegiatan dan Layanan Produk BPKP

CONSULTING

Bimbingan Teknis/Asistensi/Sosialisasi atas :

- Governansi (Tata Kelola)
- Manajemen Risiko
- Pengadaan Barang/Jasa
- Rencana Aksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Pengelolaan dan Inventarisasi Aset Daerah/Desa
- SAKIP & LAKIP
- SPIP Terintegrasi
- Aplikasi FMIS, SISKEUDES, SIMDA BMD, FORSA-BLUD, SIA BUMDesa, SIBIJAK, dan SISWASKEUDES
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)
- Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
- Asistensi Pada Saat Audit BPK
- Pembentukan SPI BUMD & BLUD
- Peningkatan Kapabilitas SPI BUMD & BLUD
- Penatausahaan Keuangan BUMD & BLUD
- Penyusunan Lapkeu BUMDesa, BUMD, dan BLUD
- Persiapan BLUD bagi Puskesmas
- Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
- Penyusunan Rencana Bisnis
- Manajemen Kinerja
- Fraud Control Plan (FCP)
- Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)
- Profiling Risiko Fraud
- Hambatan Kelancaran Pembangunan
- Kapabilitas APIP

ASSURANCE

Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan atas :

- Governansi (Tata Kelola)
- Manajemen Risiko
- Laporan Keuangan Program Dana Bantuan Luar Negeri
- Program atau Kegiatan
- Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan Pemilu
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (OPAD)
- Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Sistem Pengendalian Intern
- Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
- SPIP terintegrasi
- Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Performance Management
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Proyek Strategis Nasional
- Manajemen Kinerja
- Pengembangan Potensi Desa
- Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)
- Bantuan Pemeriksaan
- Kapabilitas APIP
- Audit Tujuan Tertentu

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Gambar 1.4 Sistematika Penyajian Laporan





BAB II

RENCANA KINERJA

A Target Kinerja Tahun 2020-2024

B Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPKP, Peraturan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi pengawasan BPKP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024.



A. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Pernyataan Visi

Untuk melaksanakan amanah yang terkandung dalam peran dan fungsi BPKP dan dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan dan potensi permasalahan (risiko) yang dihadapi, BPKP selama periode Renstra Tahun 2020-2024 mengusung visi:

Menjadi Auditor Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik Dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “*Indonesia Maju yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*”

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP menempatkan visi BPKP tersebut sebagai visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan panduan organisasi dalam melaksanakan peran dan manfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pernyataan Misi

Untuk mengaktualisasikan visi di atas, BPKP selama periode Renstra Tahun 2020-2024 mengusung misi:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP memandang misi BPKP tersebut sebagai misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan panduan organisasi dalam melaksanakan peran dan manfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP tersebut, Tujuan BPKP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan BPKP pada tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	21
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat	IACM BPKP Indeks RB Indeks Kesehatan	Level 4 84 75

Sebagai auditor internal Presiden, BPKP bertugas melakukan pengawalan atas ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat terhadap masyarakat, dan mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang bersifat penjaminan (*assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting*).

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP memandang tujuan BPKP tersebut sebagai tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang harus diwujudkan dan menjadi acuan dalam menyusun sasaran kegiatan dan penentuan arah kebijakan dan strategi serta kegiatan pengawasan yang tepat di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran Kegiatan

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan sasaran kegiatan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja Eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan sasaran kegiatan.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Rincian sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, beserta target kinerja 2020-2024 tersaji pada Lampiran 1.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
			Total
1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah			
1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)		33.682,75
1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)		5.513,66
1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)		42.465,64
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional			
2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional (PSN)		1
2.2 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	(%) Persen		85,00
2.3 Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah		2,00
3. Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP			
3.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen		80,00
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha			
4.1 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD		1,00
4.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD		11,00
4.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD		3,00
4.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes		47,00
4.5 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes		10,00
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi			
5.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen		100,00
5.2 Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen		85,00
5.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda		3,00
5.4 Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha		1,00

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
			Total
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU			
6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi		1,00
6.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kab/Kota		11,00
6.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi		1,00
6.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kab/Kota		13,00
6.5 Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi		1,00
6.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kab/Kota		5,00
6.7 Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda		14,00
6.8 Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa		25,00
6.9 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa		25,00
6.10 Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD		1,00
6.11 Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D		4,00
6.12 Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D		2,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja			
7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100		75,00
7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100		82,00
7.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen		70,00
7.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen		100,00
7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100		75,00
7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100		95,00
7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100		80,00



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- A** Pengukuran Capaian Kinerja
- B** Capaian Kinerja dan Analisis Efisiensi
- C** Akuntabilitas Keuangan
- D** Kinerja Lainnya



A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut:

Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.



B. Capaian Kinerja dan Analisis Efisiensi

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah menunjukkan sebanyak tiga dari tiga indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah					
1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	33.682,75	38.685,41	114,85	✓
1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	5.513,66	2.733.007,70	49.567,94	✓
1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	42.465,64	47.187,07	111,12	✓

Evran Lanjutan Triwulan IV 2023 secara signifikan mendukung capaian kinerja

Uraian tiga indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut:

1.1 NILAI OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH YANG TEREALISASI

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah atas potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi.

Realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp38.685.409.098 atau mencapai 114,85% dari target sebesar Rp33.682.750.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

No	Uraian	Nilai
1.	Evaluasi atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 (s.d. April 2023)	32.139.963.558,00
2.	Evaluasi atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 (April 2023)	6.545.445.540,00
Jumlah		38.685.409.098,00

Realisasi indikator ini mengalami kenaikan sebesar Rp35.361.349.283,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp3.324.059.815,00 atau naik sebesar 1.063,80%.

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar Rp453.000.000,00, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 8.539,83%.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, antara lain Evaluasi atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sudah melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap tata kelola Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai hasil pengawasan BPKP yang sebelumnya;
2. Adanya kesadaran dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah;
3. Inovasi maupun pendekatan yang baru dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan;
4. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara BPKP Perwakilan dengan Pemerintah Daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan kegiatan pengawasan baik itu assurance maupun consulting melalui peningkatan kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran dan mempertahankan hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.



1.2 NILAI EFISIENSI PENGELUARAN NEGARA DAN DAERAH

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun.

Realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp2.733.007.697.730,05 atau mencapai 49.567,94% dari target sebesar Rp5.513.660.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

No	Uraian	Nilai
1.	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran atas APBD Pemerintah Daerah	2.676.322.612.857,00
2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa	3.809.007.628,00
3.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	23.881.047.368,00
4.	Reviu (Tagihan Tunggakan Sisa Pembayaran)	888.066.352,38
5.	Audit Klaim	8.170.283.347,80
6.	Audit Tujuan Tertentu	1.408.586,65
7.	Audit Penyesuaian Harga	19.935.271.590,22
Jumlah		2.733.007.697.730,05

Realisasi indikator ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.105.400.793.495,05 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp627.606.904.235,00 atau naik sebesar 335,46%.

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar Rp112.930.000.000,00, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 2.420,09%.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini, antara lain Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran atas APBD Pemerintah Daerah, Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa, Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa, Audit Klaim, Audit Tujuan Tertentu, dan Audit Penyesuaian Harga.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan.
2. Dukungan dari manajemen untuk senantiasa melakukan inovasi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pengawasan.
3. Dukungan dari rendal dalam proses pelaksanaan penugasan berupa monitoring dan Quality Assurance.
4. Pedoman pengawasan yang lebih berkualitas.
5. Kepercayaan dari mitra kerja terhadap kompetensi BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan metode pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan kompetensi auditor untuk lebih agile dan melanjutkan hubungan baik dengan mitra.

1.3 NILAI PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Indikator nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah diukur dengan menjumlahkan temuan nilai belanja yang dikembalikan ke kas Negara termasuk denda yang dikenakan dan nilai aset yang dipulihkan.

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebesar Rp47.187.068.039,00 atau mencapai 111,12% dari target sebesar Rp42.465.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.4 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penugasan Bidang APD	291.050.000,00
2.	Penugasan Bidang Investigasi	46.896.018.039,00
Jumlah		47.187.068.039,00

Realisasi indikator ini mengalami penurunan sebesar Rp24.971.909.091.032,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp25.019.096.159.071,00 atau turun sebesar 92.552,20%.

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar Rp52.149.000.000,00, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 90,49%.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini, antara lain audit perhitungan kerugian keuangan negara dan kegiatan audit investigatif.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan.
2. Sinergi yang baik antara BPKP dan Aparat Penegah Hukum.
3. Manajemen perubahan yang dikontribusi dari kepemimpinan yang kondusif.
4. Pedoman pengawasan yang lebih berkualitas.
5. Kepercayaan dari mitra kerja terhadap kompetensi BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan metode pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan kompetensi auditor untuk lebih *agile* dan melanjutkan hubungan baik dengan mitra.

Penggunaan Anggaran dan SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 6 SHP atau 100% dari target 6 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp558.837.763,00 atau 99,71% dari anggaran Rp560.490.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 9.990 OH atau 96,59% dari rencana sebanyak 10.343 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,71%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 96,59%.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional menunjukkan sebanyak dua indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
Tata Kelola Limbah B3 dan Akselerasi Sektor Kepariwisata menjadi 2 Topik APPD	2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional	1	1	100,00	✓
	2.2 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	Persen (%)	85	100	117,65	✓
	2.3 Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Topik APPD	2	2	100,00	✓

Uraian dua indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional sebagai berikut:

2.1 JUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET

Indikator ini diukur dengan menjumlah kegiatan pengawasan terhadap proyek strategis yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT yang ditetapkan.

Pada tahun 2023 realisasi jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target sebanyak 1 dari target sebanyak 1 proyek strategis.

Tabel 3.2.2 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

No	Nama PSN	Target Progres Pekerjaan Fisik	Realisasi Progres Pekerjaan Fisik
1.	Infrastruktur PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW) pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP Kalbagtim)	96,55% (Per Triwulan IV Tahun 2023)	98,40% (Per Triwulan IV Tahun 2023)

Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 maupun dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini, antara lain kegiatan Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Infrastruktur Ketenagalistrikan atas Proyek PLTU Kalselteng 2 pada PT PLN (Persero) UIP Kalbagtim yang dilakukan setiap triwulan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dari hasil audit BPKP dan kepercayaan dari mitra kerja terhadap kompetensi BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melanjutkan hubungan baik dan komunikasi yang baik dengan mitra serta meningkatkan kompetensi auditor guna menjaga kualitas hasil pengawasan.

2.2 PERSENTASE HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG DISELESAIKAN

Indikator ini diukur dengan membagi jumlah penugasan yang berhasil menyelesaikan HKP melalui kesepakatan penyelesaian terhadap total penugasan HKP.

Pada tahun 2023 realisasi persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan adalah sebesar 100% dari target sebesar 85%.

Realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 85%, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 117,65%.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini, antara lain kegiatan evaluasi atas hambatan kelancaran pembangunan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya manajemen perubahan yang dikontribusi dari kepemimpinan yang kondusif, penataan tatalaksana yang lebih baik, pedoman pengawasan yang lebih berkualitas, dan kepercayaan dari mitra kerja terhadap kompetensi BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melanjutkan hubungan baik dengan mitra serta meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan mediasi dan evaluasi.

2.3 JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DAERAH YANG DIAWASI

Indikator ini diukur dengan menjumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan APPD yang ditetapkan yaitu Evaluasi atas Tata Kelola Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Tahun 2021-2023 pada Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Evaluasi atas Akselerasi Sektor Kepariwisata melalui Program Sungai Martapura Asri dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s.d. Tahun 2023.

Realisasi jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi adalah 2 atau mencapai 100% dari target 2 kegiatan pengawasan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan pengawasan.

Realisasi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan pengawasan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 7 kegiatan pengawasan, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 28,57%

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Tata Kelola Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Tahun 2021-2023 pada Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Evaluasi atas Akselerasi Sektor Kepariwisata melalui Program Sungai Martapura Asri dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s.d. Tahun 2023.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dari hasil audit BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan mempertahankan hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, meningkatkan kompetensi auditor guna menjaga kualitas hasil pengawasan.

Penggunaan Anggaran dan SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 2 SHP atau sebanyak 100% dari target 2 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp124.787.200,00 atau 98,83% dari anggaran Rp126.266.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 1.187 OH atau 100% dari rencana sebanyak 1.187 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 2 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 98,83%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 2 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, sama dengan capaian penggunaan SDM sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP menunjukkan sebanyak satu indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Kesepakatan antar pihak menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP				
3.1 Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen (%)	80	96	120 

3.1 PERSENTASE REKOMENDASI STRATEGIS YANG DITINDAKLANJUTI

Indikator ini diukur dengan membagi jumlah rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi strategis pada laporan gubernur.

Pada Tahun 2023, persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti adalah 96% atau mencapai 120% dari target. Realisasi indikator ini mengalami penurunan sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 100%.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan kepercayaan mitra terhadap hasil audit BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan beberapa upaya antara lain dengan menjaga kualitas rekomendasi sehingga bersifat strategis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, kegiatan yang bersifat monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan akan tetap dilakukan.

Penggunaan Anggaran dan SDM

Sasaran kegiatan Meningkatkan Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU Yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 58 SHP atau sebanyak 100% dari target 58 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp1.812.978.955,00 atau 99,69% dari anggaran Rp1.818.590.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 16.435 OH atau 99,70% dari rencana sebanyak 16.485 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 3 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,69%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 3 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 99,70%.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha menunjukkan sebanyak lima indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4.1

Tabel 3.4.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha							
Komitmen Badan Usaha menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	1	100,00	✓
	4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11	12	109,09	✓
	4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	3	3	100,00	✓
	4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	BUMDes	47	50	106,38	✓
	4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	10	11	110,00	✓

4.1 JUMLAH BUMD DENGAN PENGELOLAAN KORPORASINYA BAIK

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BUMD dengan pengelolaan korporasi baik berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pelaporan.

Pada Tahun 2023, jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasi baik sebanyak 1 BUMD atau mencapai 100% dari target. Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 maupun dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah Evaluasi atas Kualitas Governance, Risk, Control dan Compliance (GRCC) serta Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Tahun Buku 2022 Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan pembinaan kepada pengelola BUMD agar mampu mengelola korporasi dengan baik.

4.2 JUMLAH BUMD DENGAN KINERJA SEHAT

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BUMD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pelaporan. Kriteria BUMD dengan kinerja sehat adalah memperoleh skor kinerja di atas 2,80 untuk BUMD Jasa Air dan di atas 65,00 untuk BUMD Aneka Usaha.

Pada Tahun 2023, jumlah BUMD dengan kinerja sehat sebanyak 12 BUMD atau mencapai 109,09% dari target. Realisasi indikator ini sama dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 12 BUMD. Rincian pada Tabel 3.4.2.

Tabel 3.4.2 Ringkasan Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

No	Nama BUMD	Skor	Tingkat Kesehatan
1.	PTAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	3,81	Sehat
2.	PTAM Tabalong	3,74	Sehat
3.	PDAM Tapin	3,56	Sehat
4.	PTAM Tirta Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,53	Sehat
5.	PTAM Kabupaten Tanah Laut	3,32	Sehat
6.	PDAM Kotabaru	3,17	Sehat
7.	PTAM Hulu Sungai Tengah	3,15	Sehat
8.	PTAM Intan Banjar	3,14	Sehat
9.	PDAM Hulu Sungai Utara	3,06	Sehat
10.	PDAM Tanah Bumbu	3,01	Sehat
11.	PDAM Barito Kuala	2,91	Sehat
12.	PDAM Balangan	2,85	Sehat

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 12 BUMD, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 100%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah evaluasi kinerja atas BUMD Jasa Air.

Dari hasil pengawasan atas 12 kegiatan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain:

Tabel 3.4.3 Area of Improvement

No	Area of Improvement	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kejadian
1.	Tarif rata-rata air Perusahaan tidak dapat menutup biaya secara penuh	12	8
2.	Perusahaan belum memenuhi standar terkait kualitas air minum dan kontinuitas air	12	12
3.	Perubahan status hukum dalam proses	12	5
4.	Cakupan pelayanan Perusahaan terbatas	12	9
5.	Perusahaan mengalami kerugian	12	7
6.	Manajemen Perusahaan belum memiliki penatakelolaan yang baik	12	12
7.	Tingkat kehilangan air perusahaan lebih tinggi dari yang ditoleransi standar	12	3
8..	Perusahaan berisiko bangkrut untuk jangka panjang	12	2

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada PDAM sehingga dapat berkinerja sehat.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan serta komitmen dari pengelola BUMD untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengkaji tarif air perusahaan, melakukan pembinaan kepada pengelola BUMD agar mampu melakukan pengendalian risiko fraud, meningkatkan fungsi dan peran Satuan Pengawas Internal perusahaan dan menetapkan status badan hukum BUMD.

4.3 JUMLAH BLUD DENGAN KINERJA SEHAT

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BLUD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pelaporan. Kriteria BLUD dikatakan memiliki kinerja sehat apabila mendapat skor skor kinerja di atas 65,00.

Pada Tahun 2023, jumlah BLUD dengan kinerja sehat sebanyak 3 BLUD atau mencapai 100% dari target. Realisasi indikator ini sama dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 3 BLUD. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4.4 BLUD dengan kinerja sehat

No	Nama BLUD	Skor	Tingkat Kesehatan
1.	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	81	Sangat Baik
2.	RSUD Balangan Kabupaten Balangan	80	Sangat Baik
3.	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin	78	Baik

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 2 BLUD, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 150%.

Realisasi kinerja terdiri dari realisasi sebanyak 3 BLUD berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa 3 kegiatan evaluasi kinerja pada BLUD RSUD.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah.

Dari hasil pengawasan atas 3 kegiatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain:

Tabel 3.4.5 Area of Improvement

No	Area of Improvement	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kejadian
1.	Kebutuhan sarana prasarana dan SDM secara kuantitas dan kualitas belum terpenuhi	3	3
2.	Pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya	3	3
3.	Implementasi dan pemahaman modul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum berjalan maksimal	3	3
4.	manajemen RSUD belum melakukan monitoring dan revidu berkala atas penerapan kode etik dan sistem reward and punishment	3	3
5.	manajemen RSUD belum mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan isu antar stakeholder	3	2
6.	manajemen belum menyusun rencana strategis BLUD, manajemen risiko non operasional seperti risiko strategis dan risiko kecurangan	3	2
7.	pelaporan hasil pengawasan Satuan Pengawasan Intern (SPI) belum terkait aktivitas minimal dan belum dilakukan monitoring dan pengawasan SPI belum dikembangkan	3	3
8.	pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terbatas	3	2
9.	Kelemahan jenis Standar Pelayanan Minimal pada pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap, Persalinan, Perinatologi dan Keluarga, Pelayanan Radiologi, Pemeliharaan sarana rumah sakit, Administrasi dan Manajemen, serta Pelayanan Ambulance.	3	3

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada BLUD sehingga dapat berkinerja sehat.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan serta komitmen dari pengelola BLUD untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan pembinaan kepada pengelola BLUD agar mampu melakukan pengendalian risiko fraud, dan meningkatkan fungsi dan peran Satuan Pengawas Internal.

4.4 JUMLAH BUMDES YANG MAMPU MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan pada tahun pelaporan.

Pada Tahun 2023, jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan sebanyak 50 BUMDes atau mencapai 106,38% dari target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4.6 Bumdes yang mampu menyusun laporan keuangan

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah BUMDes yang Menyusun Laporan Keuangan
1.	Banjar	Aluh-Aluh	1
2.	Banjar	Astambul	9
3.	Banjar	Beruntung Baru	1
4.	Banjar	Cintapuri Darussalam	2
5.	Banjar	Gambut	1
6.	Banjar	Karang Intan	10
7.	Banjar	Kertak Hanyar	2
8.	Banjar	Martapura	4
9.	Banjar	Martapura Barat	2
10.	Banjar	Martapura Timur	2
11.	Banjar	Mataraman	4
12.	Banjar	Sambung Makmur	1
13.	Banjar	Simpang Empat	3
14.	Banjar	Sungai Pinang	1
15.	Banjar	Sungai Tabuk	4
16.	Banjar	Tatah Makmur	2
17.	Banjar	Telaga Bauntung	1

Realisasi indikator ini mengalami penurunan sebanyak 2 BUMDes jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebanyak 52 BUMDes.

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 53 BUMDes, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 94,34%.

Realisasi kinerja terdiri dari realisasi sebanyak 50 BUMDes berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola BUMDes Tahun 2023 pada Kabupaten Banjar.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya pembinaan dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun laporan keuangan, serta peran pendamping desa dan dinas terkait dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMDes yang belum mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri.

4.5 JUMLAH BUMDES YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DESA

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa melalui Pendapatan Asli Desa.

Pada Tahun 2023, jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sebanyak 11 BUMDes atau mencapai 110% dari target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4.7 BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa

No	Kab.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes
1.	Banjar	Karang Intan	Sungai Alang	Berkat Bersama
2.	Banjar	Karang Intan	Sungai Asam	Karya Mandiri
3.	Banjar	Karang Intan	Mandiingin Barat	Bina Bersama
4.	Banjar	Kertak Hanyar	Simpang Empat	Harapan Kita
5.	Banjar	Martapura	Pasayangan Selatan	Berlian
6.	Banjar	Martapura	Tungkaran	Barokah
7.	Banjar	Martapura Barat	Sungai Rangas Tengah	Bina Sejahtera
8.	Banjar	Sungai Tabuk	Sungai Bakung	Bakung Lestari
9.	Banjar	Sungai Tabuk	Tajau Landung	Tajau Landung Mandiri
10.	Banjar	Telaga Bauntung	Rantau Bujur	Usaha Maju Bersama
11.	Banjar	Telaga Bauntung	Telaga Baru	Karya Banta

Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Realisasi kinerja terdiri dari realisasi sebanyak 11 BUMDes berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa kegiatan Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola BUMDes Tahun 2023 pada Kabupaten Banjar.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah pemilihan jenis usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan dukungan dari pemerintah desa berupa penyertaan modal kepada BUMDes.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berupaya memaksimalkan anggaran pengawasan yang tersedia secara efektif dan efisien.

Penggunaan Anggaran dan SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 4 SHP atau sebanyak 100% dari target 4 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp117.058.354,00 atau 99,89% dari anggaran Rp117.190.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 1.433 OH atau 100% dari rencana sebanyak 1.433 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 4 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,89%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 4 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, sama dengan penggunaan SDM sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi menunjukkan sebanyak empat indikator kinerja (100%) telah tercapai sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5.1.

Tabel 3.5.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi					
5.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	✓
5.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	85	100	117,65	✓
5.3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	3	100,00	✓
5.4 Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha	1	1	100,00	✓

Kompetensi SDM dan Kepercayaan mitra memegang peranan penting dalam pencapaian kinerja

5.1 PERSENTASE HASIL PENGAWASAN REPRESIF YANG DIMANFAATKAN/DITINDAKLANJUTI

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dihadapan penyidik dan di persidangan pada tahun 2023 atas Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN).

Pada tahun 2023, realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 100%, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 100%

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. PKA Dihadapan Penyidik

Terdapat 6 Pemberian Keterangan Ahli Dihadapan Penyidik atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi, perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Pengadaan Tanah Aset Daerah, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Kupedes, perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Penjualan Tanah Kas Desa, perkara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Rehab Berat, dll.

2. PKA di Persidangan

Terdapat 17 Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Graving Dock, perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Dana Hibah KONI, perkara dugaan tindak korupsi atas Pembangunan Fisik, perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Penyalahgunaan Pinjaman Kredit, perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemotongan Dana Bantuan Biaya Hidup, perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa, perkara dungan tindak pidana korupsi atas Penyalahgunaan Program Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan (DPKUP), perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Pengelolaan Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dll.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kepercayaan mitra terhadap hasil audit BPKP dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pemberian keterangan ahli.

Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan kompetensi pegawai guna menjaga kualitas audit dan meningkatkan kepercayaan mitra kerja.

5.2 PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PREVENTIF DAN EDUKATIF YANG DIMANFAATKAN /DITINDAKLANJUTI

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah daerah/OPD/badan usaha yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP), Profiling Risiko Fraud, dan Pembelajaran Anti Korupsi, dengan jumlah pemerintah daerah/OPD/badan usaha yang dilakukan pembinaan FCP, Profiling Risiko Fraud, dan Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi pada tahun berjalan.

Pada tahun 2023 realisasi Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target sebesar 85%.

Realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 90%, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 111,11%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP)

Sosialisasi dan Penilaian Diagnosis Fraud Control Plan bertujuan untuk mencegah, memudahkan pendeteksian dan pengungkapan kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan dengan implementasi beberapa atribut dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dari kegiatan Sosialisasi dan Penilaian Diagnosis FCP yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil pengendalian risiko kecurangan pada Pemerintah Kota Banjarbaru tidak memadai, hal ini tampak dari hasil pengujian eksistensi 4 dari 10 atribut FCP (Struktur Anti Kecurangan, Penilaian Risiko Kecurangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Pihak

Ketiga) dengan presentasi di bawah 30% dan pengujian implementasi 5 dari 10 atribut FCP (Struktur Anti Kecurangan, Penilaian Risiko Kecurangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pihak Ketiga, dan Investigasi) dengan presentasi di bawah 50%.

Atas hal-hal yang perlu perbaikan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan 4 rekomendasi.

2. Coaching Clinics Penyusunan Pedoman Pengawasan Keinvestigasian
Coaching Clinics Penyusunan Pedoman Pengawasan Keinvestigasian bertujuan untuk mendampingi mitra untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kinerja pengawasan bidang keinvestigasian.

Hasil Coaching Klinik Penyusunan Pedoman menemukan bahwa diperlukan adanya pedoman penugasan yang memberikan *guidance* kepada seluruh personel yang melakukan penugasan-penugasan keinvestigasian, yang diformalkan melalui Peraturan Bupati. Atas ketiadaan pedoman yang berbentuk Peraturan Bupati kami menemukan adanya risiko pada beberapa aspek, yaitu:

- a. aspek kelembagaan/organisasi, berupa risiko gugatan hukum atas hasil pengawasan,
- b. aspek manajemen, berupa risiko hasil pengawasan tidak sesuai standar,
- c. aspek sumber daya manusia berupa risiko tidak teralokasinya SDM sesuai dengan kebutuhan penugasan, dan
- d. aspek budaya organisasi dan kepemimpinan, berupa risiko gangguan terhadap independensi dan objektivitas serta kemungkinan adanya konflik kepentingan.

3. Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi
Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Banjarbaru dengan tujuan pemahaman kepada tenaga pendidik dan kependidikan SMKPP Negeri Banjarbaru mengenai korupsi, penyebab dan strategi dalam pemberantasan korupsi, dan membangun kepedulian para peserta untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi menghasilkan kesepakatan dan komitmen peserta mengenai pembentukan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK).

4. Sosialisasi Penanganan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kepercayaan mitra kerja terhadap rekomendasi BPKP guna mendukung pencegahan dan pengendalian kecurangan (*fraud*) di lingkungan kerjanya

Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan mengembangkan dan memperluas wawasan pegawai bidang Investigasi sehingga mampu membantu mitra kerja guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

5.3. JUMLAH PEMDA DENGAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI BAIK

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki efektivitas pengendalian korupsi baik.

Pada tahun 2023 realisasi Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik adalah sebanyak 3 pemda dari target sebanyak 3 pemda.

Realisasi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 3 pemda dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 4 pemda, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 75%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5.2 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

No	Pemerintah Daerah	Skor IEPK	Predikat
1.	Kota Banjarmasin	3,090	Terdefinisi
2.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,020	Terdefinisi
3.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3,020	Terdefinisi

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Assessment Status Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023
2. Assessment Status Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
3. Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Status Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
4. Sosialisasi Penanganan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah kekurangan sumber daya pada pemerintah daerah yang dilakukan pendampingan.

Untuk meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan memperluas Sosialisasi, Diagnostic Assessment, dan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan serta Assessment Status IEPK ke Pemerintah Daerah yang memiliki nilai Efektivitas Pengendalian Korupsi dibawah 3,00.

5.4 JUMLAH BADAN USAHA DENGAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI BAIK

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah badan usaha yang memiliki efektivitas pengendalian korupsi baik.

Pada tahun 2023 realisasi Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik adalah sebanyak 1 badan usaha dari target sebanyak 1 badan usaha.

Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi atribut Fraud Control Plan (FCP) dalam rangka peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada PT Air Minum Intan Banjar
2. Pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Perusahaan Umum Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah kekurangan sumber daya pada badan usaha yang dilakukan pendampingan.

Untuk meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan memperluas Sosialisasi, Diagnostic Assessment, dan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan serta Assessment Status IEPK ke badan usaha yang memiliki nilai Efektivitas Pengendalian Korupsi dibawah 3,00.

Penggunaan Anggaran dan SDM

Sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 2 SHP atau sebanyak 100% dari target 2 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp34.418.508,00 atau 99,59% dari anggaran Rp34.560.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 1.904 OH atau 100% dari rencana sebanyak 1.904 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 5 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,59%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 5 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, sama dengan capaian penggunaan SDM sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU menunjukkan sebanyak sembilan dari dua belas indikator kinerja (75%) telah tercapai targetnya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.1.

Tabel 3.6.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

manajemen risiko masih menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Realisasi	
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00	✓
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	11,00	11,00	100,00	✓
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00	✓
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	13,00	12,00	92,31	✗
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00	✓
6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	5,00	3,00	60,00	✗
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	14,00	3,00	21,43	✗
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00	78,00	312,00	✓
6.9	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	49,00	196,00	✓
6.10	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	1,00	1,00	100,00	✓
6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	4,00	4,00	100,00	✓
6.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	2,00	2,00	100,00	✓

Uraian dua belas indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU sebagai berikut:

6.1 JUMLAH APIP PROVINSI DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah provinsi dengan kapabilitas APIP \geq level 3 (delivered) pada tahun pelaporan berdasarkan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri.

Realisasi Tahun 2023, jumlah provinsi dengan kapabilitas APIP level 3 sebanyak 1 APIP, yaitu Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan atau mencapai 100% dari target.

Indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024, sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator yang digunakan merupakan gabungan dari indikator 6.1 dan indikator 6.2.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja antara lain mendorong APIP untuk melaksanakan penilaian mandiri secara periodik, dan menjalin komunikasi serta koordinasi yang lebih erat dengan pimpinan APIP dan pejabat fungsional auditor.

6.2 JUMLAH APIP KABUPATEN/KOTA DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas APIP \geq level 3 (delivered) pada tahun pelaporan berdasarkan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri.

Realisasi tahun 2023, jumlah APIP dengan kapabilitas APIP \geq level 3 (delivered) sebanyak 11 APIP atau mencapai 100% dari target 11 APIP.

Sebagaimana telah dijelaskan pada indikator 6.1, indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024. Dalam Renstra 2020-2024 tidak merinci ke dalam provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator 6.1 dan 6.2 akan digabung. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan kapabilitas APIP \geq level 3 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu dari 6 APIP menjadi 11 APIP, dan jumlah APIP Provinsi sebanyak 1 APIP. Sehingga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 sebanyak 13 APIP, capaiannya adalah 92,31%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan diseminasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Mendorong APIP melaksanakan penilaian mandiri dengan memberikan atensi kepada Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota perihal pelaksanaan penilaian mandiri kapabilitas APIP.
3. Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP.

4. Bimbingan teknis penyusunan PPBR dan audit kinerja berbasis risiko.
5. Melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 bagi APIP yang menuju level 3.
6. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan APIP maupun pejabat fungsional auditor.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rencana aksi Pimpinan Daerah terkait dengan peningkatan Kapabilitas APIP dan implementasi manajemen risiko.
2. Keterikatan pimpinan APIP dengan upaya peningkatan Kapabilitas APIP.
3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bidang pengawasan dalam mengoptimalkan penggunaan/pengalokasian sumber daya APIP secara ekonomis, efisien, dan efektif ke area pengawasan yang strategis, prioritas, dan berisiko tinggi dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan kinerja kedepannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan:

1. Memotivasi dan menumbuhkan kesadaran jajaran APIP tentang pentingnya meningkatkan kapabilitas APIP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mendampingi APIP dalam membuat road map kegiatan tahun 2024, khususnya perihal peningkatan kualitas kapabilitas APIP.
3. Melakukan pembinaan dan bimbingan yang berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan forum eksekutif kepala daerah secara formal dan informal ketika pertemuan tingkat pimpinan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya kapabilitas APIP dan penerapan WBS.
5. Bersinergi dengan bidang lain dalam peningkatan kompetensi SDM APIP untuk menyusun dan mengevaluasi risk register OPD.

6.3 JUMLAH PROVINSI DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan jumlah Provinsi yang berhasil memenuhi aspek dalam maturitas SPIP \geq Level 3 (Terdefinisi) adalah organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik.

Realisasi jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 adalah 1 atau mencapai 100% dari target.

Indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024, sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator yang digunakan merupakan gabungan dari indikator 6.3 dan indikator 6.4.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, antara lain Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bimtek Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SKPD di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kegiatan sosialisasi pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja antara lain mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan penilaian mandiri secara periodik, dan menjalin komunikasi serta koordinasi yang lebih erat dengan pihak manajemen pemerintah daerah.

6.4 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP \geq Level 3 pada tahun pelaporan.

Realisasi tahun 2023 telah terdapat 12 Pemerintah Kabupaten/Kota atau mencapai 92,31% dari target 13 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai maturitas SPIP \geq Level 3, dengan rincian pada tabel 3.6.2.

Tabel 3.6.2 Rincian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

No	Pemerintah Daerah	Nilai	
1.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,554	✓
2.	Kabupaten Kotabaru	3,436	✓
3.	Kabupaten Barito Kuala	3,429	✓
4.	Kabupaten Banjar	3,262	✓
5.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,260	✓
6.	Kabupaten Tanah Bumbu	3,205	✓
7.	Kabupaten Balangan	3,202	✓
8.	Kota Banjarbaru	3,165	✓
9.	Kota Banjarmasin	3,152	✓
10.	Kabupaten Tabalong	3,099	✓
11.	Kabupaten Tanah Laut	3,035	✓
12.	Kabupaten Tapin	3,013	✓
13.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2,980	✗

Sebagaimana telah dijelaskan pada indikator 6.3, indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024. Dalam Renstra 2020-2024 tidak merinci ke dalam provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator 6.3 dan 6.4 akan digabung. Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq level 3 sama dengan tahun 2022 yaitu 12 Pemda, dan jumlah Pemda Provinsi sebanyak 1 Pemda. Sehingga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 sebanyak 14 Pemda, capaiannya adalah 92,86%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan persiapan, penilaian mandiri serta penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Keinginan pemerintah daerah untuk menerapkan SPIP terintegrasi pada daerahnya masing-masing
2. Pemerintah daerah telah menjadikan SPIP sebagai target kinerja.
3. Kompetensi pegawai BPKP yang menangani SPIP terintegrasi telah mencukupi secara kualitas dan kuantitas.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan:

1. Mengajak pemerintah daerah untuk melakukan penilaian mandiri SPIP lebih awal.
2. Mendampingi proses persiapan, penilaian mandiri, dan penjaminan kualitas pada seluruh pemerintah daerah, terutama pada kabupaten Hulu Sungai Tengah yang SPIP nya masih Level 2.

6.5 JUMLAH PROVINSI DENGAN MRI > LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan jumlah provinsi yang berhasil memenuhi aspek dalam $MRI \geq \text{Level 3}$ (terdefinisi).

Realisasi jumlah Provinsi dengan Maturitas $MRI \geq \text{Level 3}$ adalah 1 Pemerintah Provinsi atau mencapai 100% dari target. Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023.

Realisasi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1 Pemerintah Provinsi dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 1 Pemerintah Provinsi, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 100%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, antara lain Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bimtek Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SKPD di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kegiatan sosialisasi pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja antara lain mendorong pemerintah daerah. untuk melaksanakan penilaian mandiri secara periodik, dan menjalin komunikasi serta koordinasi yang lebih erat dengan pihak manajemen pemerintah daerah.

6.6 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MRI \geq LEVEL 3

Indikator Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan jumlah Kabupaten/Kota yang berhasil memenuhi aspek dalam MRI \geq Level 3 (terdefinisi). Target kinerja ini pada Tahun 2022 adalah 3 Kabupaten/Kota.

Realisasi jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas MRI \geq Level 3 adalah 3 Kabupaten/Kota atau mencapai 60% dari target 5 Kabupaten/Kota. Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 2 Kabupaten/Kota.

Tabel 3.6.3 Rincian Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

No	Pemerintah Daerah	Nilai	
1.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,438	✓
2.	Kota Banjarbaru	3,069	✓
3.	Kota Banjarmasin	3,004	✓
4.	Kabupaten Tanah Laut	2,800	✗
5.	Kabupaten Tapin	2,738	✗

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 7 Kabupaten/Kota, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 42,86%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2023.
2. Pendampingan manajemen risiko pada Kabupaten/Kota.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan dan mengimplementasikan manajemen risiko.
2. Sumber daya pemerintah daerah belum memahami proses manajemen risiko.

Untuk meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan:

1. Mendampingi proses penyusunan kebijakan manajemen risiko pemerintah daerah.
2. Mendampingi proses pelaksanaan manajemen risiko pemerintah daerah.

6.7 JUMLAH PEMDA YANG AKUNTABEL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA DAERAH

Indikator ini diukur dengan jumlah pemerintah daerah yang berhasil memenuhi kriteria akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah antara lain opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 WTP dan nilai SAKIP tahun 2022 minimal BB.

Realisasi jumlah pemerintah daerah yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah adalah 3 atau mencapai 21,43% dari target sebanyak 14 pemerintah daerah. Realisasi indikator ini sama dengan tahun 2022 sebanyak 3 pemda.

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 2,58% dari jumlah keseluruhan pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Selatan, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 830,56%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
2. Penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas opini LKPD.
3. Pendampingan/asistensi dalam rangka penyusunan LKPD.
4. FGD troubleshooting FMIS, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA BMD.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah kualitas perencanaan pemerintah daerah yang kurang baik sehingga nilai SAKIP rendah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan. Melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran serta pendampingan optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

6.8 JUMLAH DESA YANG PENGELOLAAN KEUANGANNYA AKUNTABEL

Indikator ini diukur dengan jumlah desa yang berhasil memenuhi kriteria akuntabel dalam pengelolaan keuangan yaitu telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.

Realisasi jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel adalah 78 desa atau mencapai 312% dari target sebanyak 25 desa. Realisasi indikator ini mengalami kenaikan sebanyak 58 desa jika dibandingkan dengan tahun 2022 atau sebesar 290%. Rincian pada Tabel 3.6.4.

Tabel 3.6.4 Rincian Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

No	Kabupaten	Jumlah Desa
1.	Kabupaten Tapin	10
2.	Kabupaten Banjar	8
3.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	10
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	10
5.	Kabupaten Balangan	10
6.	Kabupaten Tanah Bumbu	10
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	10
8.	Kabupaten Kotabaru	10

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa.
2. Bimbingan Teknis aplikasi Siskeudes dan pengelolaan aset desa.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut sinergitas yang baik antara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa se Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, pihak Inspektorat Kabupaten/Kota juga senantiasa melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan keuangan desa.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kompetensi auditor demi menjaga kualitas pengawasan baik itu consulting maupun assurance. Selain tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah.

6.9 JUMLAH DESA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ASET DESA SECARA MEMADAI

Indikator ini diukur dengan jumlah desa yang berhasil memenuhi kriteria pengelolaan aset desa secara memadai, yaitu desa sudah melakukan inventarisasi aset desa pada tahun pelaporan.

Realisasi jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai adalah 49 desa atau mencapai 196% dari target sebanyak 25 desa. Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 20 desa dari capaian indikator tahun 2022 sebanyak 29 desa atau 145%.

Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 418 desa, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 11,72%.

Tabel 3.6.5 Rincian Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

No	Kabupaten	Jumlah Desa
1.	Kabupaten Tanah Laut	8
2.	Kabupaten Tapin	8
3.	Kabupaten Tabalong	8
4.	Kabupaten Barito Kuala	5
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	10
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	10

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Tata Kelola, Akuntabilitas Keuangan, dan Aset Desa.
2. Monitoring dan Evaluasi atas Governansi Aset Desa.
3. Bimbingan Teknis aplikasi Siskeudes dan pengelolaan aset desa.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sinergitas yang baik antara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa se Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, pihak Inspektorat Kabupaten/Kota juga senantiasa melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan keuangan desa.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kompetensi auditor demi menjaga kualitas pengawasan baik itu consulting maupun assurance. Selain tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah.

6.10 JUMLAH BUMD DENGAN MRI \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan jumlah BUMD yang berhasil memenuhi aspek dalam MRI \geq Level 3 (terdefinisi).

Pada tahun 2023, jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 1 BUMD atau mencapai 100% dari target, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6.6 BUMD dengan MRI \geq LEVEL 3

No	Nama BUMD	Skor	Predikat
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel)	2,00	Low to Moderate
2.	PT Air Minum Bandarmasih	3,36	Terdefinisi

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 3 BUMD, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 33,33%.

Realisasi kinerja terdiri dari realisasi sebanyak 1 BUMD berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa kegiatan Desk Reviu Tingkat Maturitas Manajemen Risiko.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah dengan melaksanakan Desk Reviu Tingkat Maturitas Manajemen Risiko pada PT Air Minum Bandarmasih.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kompetensi auditor SPI yang telah memadai dan dukungan dari manajemen terhadap pelaksanaan manajemen risiko.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis kepada BUMD yang belum menerapkan manajemen risiko terkait pentingnya manajemen risiko untuk mendukung tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan dan menjamin keberlangsungan usaha.

6.11 JUMLAH BLUD DENGAN MRI \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan jumlah BLUD yang berhasil memenuhi aspek dalam MRI \geq Level 3 (terdefinisi).

Pada Tahun 2023, jumlah BLUD dengan dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 4 BLUD atau mencapai 100% dari target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6.7 BLUD dengan MRI \geq LEVEL 3

No	Nama BLUD	Skor	Predikat
1.	RSD Idaman Kota Banjarbaru	3,025	Terdefinisi
2.	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Kota Banjarmasin	3,025	Terdefinisi
3.	RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	3,02	Terdefinisi
4.	RSUD Ratu Zalecha Kabupaten Banjar	3,2425	Terdefinisi

Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 4 BLUD, maka realisasi IKK tahun 2023 mencapai 100%.

Realisasi kinerja terdiri dari realisasi sebanyak 4 BLUD berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa kegiatan valuasi Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Rumah Sakit.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah melakukan kegiatan asesmen berupa penilaian tingkat maturitas manajemen risiko rumah sakit.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan, dan perencanaan BLUD telah memadai.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kedepannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan kompetensi pegawai untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kepercayaan mitra kerja.

6.12 JUMLAH BLUD DENGAN KAPABILITAS SPI \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan jumlah BLUD yang berhasil memenuhi aspek dalam Kapabilitas SPI \geq Level 3 (terdefinisi).

Pada Tahun 2023, jumlah BLUD dengan dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sebanyak 2 BLUD atau mencapai 100% dari target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6.8 BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

No	Nama BLUD	Skor	Predikat
1.	RSD Idaman Kota Banjarbaru	3,000	Delivered
2.	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Kota Banjarmasin	3,000	Delivered

Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 maupun dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Realisasi kinerja terdiri dari realisasi sebanyak 2 BLUD berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa kegiatan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas SPI Rumah Sakit.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah melakukan kegiatan asesmen berupa penilaian tingkat kapabilitas SPI rumah sakit.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan, dan kapabilitas SPI telah memadai.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kedepannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan kompetensi pegawai untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kepercayaan mitra kerja.

Penggunaan Anggaran dan SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 15 SHP atau sebanyak 100% dari target 15 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp979.543.565,00 atau 99,45% dari anggaran Rp984.949.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 7.973 OH atau 99,46% dari rencana sebanyak 8.016 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 6 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,45%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 6 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 99,46%.



Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Pelayanan “Ketatausahaan” Unit Kerja menunjukkan sebanyak tujuh indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7.1.

Tabel 3.7.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja					
7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	84,67	112,89	✓
7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	83,05	101,28	✓
7.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	% (Persen)	70	96,23	137,47	✓
7.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	% (Persen)	100	100,00	100,00	✓
7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	85,77	114,36	✓
7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	97,43	102,56	✓
7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 110	80	105,00	131,25	✓

Keteladanan pimpinan, pembangunan SDM, dan kendali mutu memiliki peranan penting dalam capaian tata kelola unit kerja,

7.1 NILAI SKOR ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA

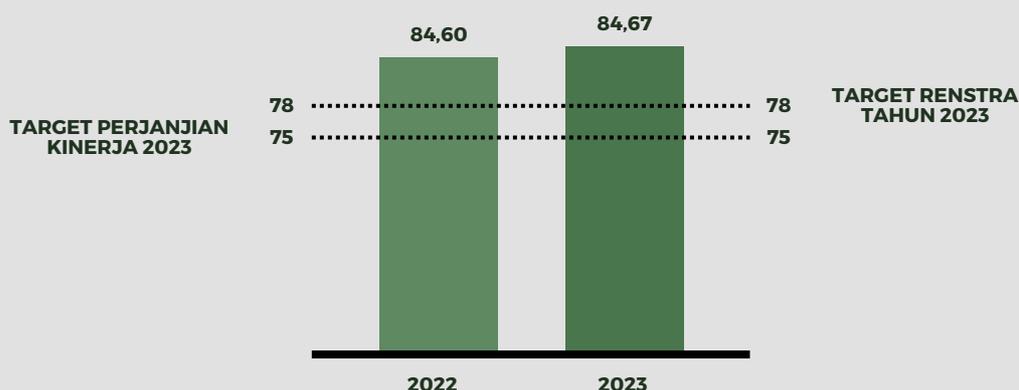
Indikator “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Realisasi nilai skor zona integritas unit kerja tahun 2023 adalah 84,67 atau mencapai 112,89% dari target sebesar 75 dari skor skala 100, dengan rincian pada Tabel 3.7.2:

Tabel 3.7.2 Ringkasan nilai skor zona integritas unit kerja

No	Uraian	Pengungkit	Skor	
			Reform	Hasil
1.	Manajemen Perubahan	3,37	3,67	-
2.	Penataan Tatalaksana	2,35	2,75	-
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,86	4,25	-
4.	Penguatan Akuntabilitas	4,41	4,33	-
5.	Penguatan Pengawasan	5,60	6,88	-
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,19	3,76	-
7.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	-	-	20,16
8.	Kualitas Layanan Publik	-	-	16,10
Jumlah		22,77	25,64	36,26
Total Skor				84,67

Perbandingan realisasi nilai skor zona integritas unit kerja tahun 2023 dengan target renstra disajikan pada grafik berikut.



Nilai skor Zona Integritas unit kerja mengalami kenaikan dari tahun 2022 dan telah mencapai 107,31% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Adanya keteladanan Pimpinan dan iklim kerja yang memungkinkan penerapan integritas oleh Pegawai.
2. Adanya pembangunan kompetensi SDM secara terus menerus.
3. Penerapan sistem kendali mutu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

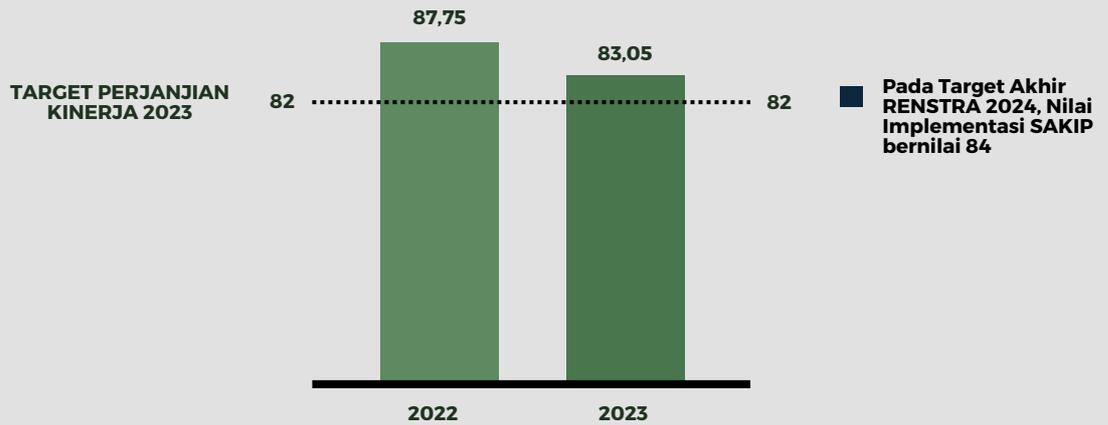
Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja, antara lain:

1. Penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkelanjutan atau pelaksanaannya; dan
2. Pengembangan kompetensi pegawai terutama di lingkungan Bagian Tata Usaha.

7.2 NILAI SAKIP UNIT KERJA

Indikator ini diukur berdasarkan hasil quality assurance implementasi SAKIP oleh Tim Inspektorat BPKP.

Realisasi nilai SAKIP adalah sebesar 83,05 atau mencapai 101,28% dari target nilai 82. Perbandingan realisasi nilai Implementasi SAKIP tahun 2023 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 dan mencapai 98,87% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja antara lain terdapat ukuran kinerja koordinator pengawasan bidang atau pejabat struktural eselon III dan eselon IV sebagai turunan kinerja atasannya dan terdapat pemantauan mengenai pencapaian kinerja.

Rencana tindak untuk mempertahankan kinerja yaitu dengan meningkatkan pemantauan dan pemanfaatan atas rencana aksi.

7.3 PERSENTASE EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN UNIT KERJA (SPIP UNIT KERJA)

Indikator ini diukur dengan penurunan dampak dan frekuensi (level risiko) atas risiko yang teridentifikasi. Realisasi tahun 2023 sebesar 96,23 atau mencapai 137,47% dari target sebesar 70, dengan rincian pada Tabel 3.7.3 di bawah.

Tabel 3.7.3 Realisasi penurunan dampak dan frekuensi risiko yang teridentifikasi

No	Uraian	Jumlah
1.	Risiko teridentifikasi dan dimitigasi	53
2.	Jumlah risiko yang menurun level risiko setelah dilakukan pengendalian intern	51

Di dalam renstra 2020-2024, Indikator ini berupa pernyataan level yaitu Level 4. Capaian terhadap target akhir renstra 2020-2024 mencapai 137,47%.

Skor SPIP unit kerja mengalami kenaikan sebesar 19,04 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 77,19.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah pemilik resiko telah melaksanakan tindak pengendalian sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Rencana aksi ke depan untuk meningkatkan kinerja antara lain melaksanakan identifikasi risiko dengan cermat, melakukan analisis penyebab resiko, menyusun rencana tindak pengendalian, dan melaksanakan tindak pengendalian.

7.4 PERSENTASE PENYELESAIAN RTP (MRI UNIT KERJA)

Indikator ini diukur dengan realisasi penyelesaian rencana tindak pengendalian dibandingkan daftar rencana tindak yang telah disusun. Realisasi tahun 2023 telah dilaksanakan 12 tindak pengendalian dari 12 yang ditetapkan sebagai tindak pengendalian atau 100%, dengan rincian pada Tabel 3.7.4 dibawah.

Tabel 3.7.4 Realisasi penyelesaian rencana tindak pengendalian dari rencana tindak yang telah disusun

No	Uraian	Jumlah
1.	Risiko teridentifikasi	44
2.	Penyebab teridentifikasi	44
3.	Rencana Tindak Pengendalian	12
4.	Realisasi Tindak Pengendalian	12

Di dalam renstra 2020-2024, Indikator ini berupa pernyataan level yaitu Level 4. Capaian terhadap target akhir renstra 2020-2024 mencapai 100,00%.

Skor MRI unit kerja sama dengan capaian tahun 2022 sebesar 100%.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain adanya komitmen dari seluruh pemilik resiko untuk melaksanakan tindak pengendalian yang telah direncanakan dan adanya pemantauan oleh Pimpinan.

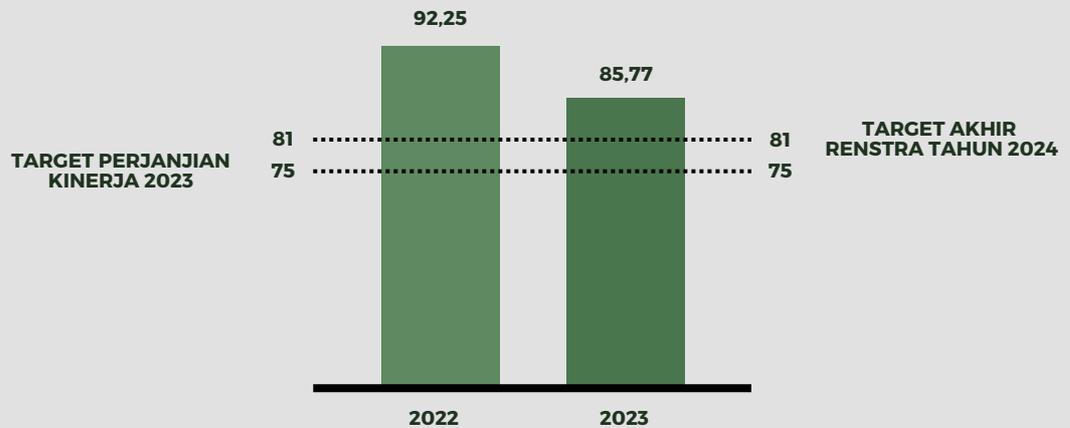
Rencana aksi ke depan untuk meningkatkan kinerja antara lain dengan melakukan identifikasi dan mitigasi risiko sesuai tugas yang akan dilaksanakan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan menyusun rencana tindak pengendalian serta melakukan monitoring pelaksanaannya.

7.5 INDEKS KUALITAS LAYANAN EKSTERNAL UNIT KERJA

Indikator ini diukur berdasarkan survei yang dilakukan kepada mitra kerja yang menerima layanan tahun 2023. Periode yang disurvei adalah atas layanan yang diberikan selama bulan Januari s.d. Desember tahun 2023.

Hasil survei menunjukkan nilai kepuasan sebesar 85,77 atau mencapai 114,36% dari target sebanyak 75,00.

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan tahun 2023 dengan target tahun 2020 - 2024 pada Grafik berikut.



Dari Grafik diatas, Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja Perwakilan mengalami penurunan sebesar 6,48 dari tahun 2022 dan mencapai 105,89% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 81.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain kualitas layanan yang diberikan telah memenuhi harapan mitra kerja dan kompetensi SDM yang melaksanakan tugas pengawasan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Rencana aksi peningkatan capaian kinerja antara lain melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua fokus penilaian secara berkala dan mendokumentasikan dalam rangka perbaikan yang berkelanjutan, serta melakukan perbaikan berupa pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan secara otomatis/ online.

7.6 SKOR IKPA UNIT KERJA

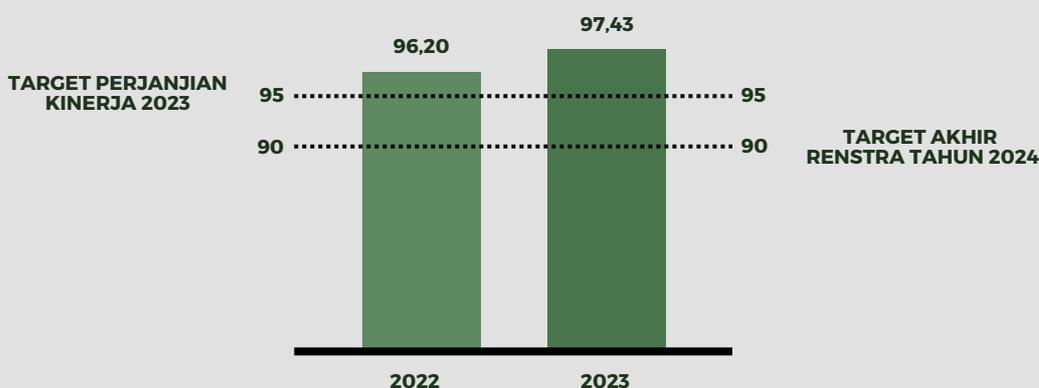
Indikator ini diukur berdasarkan hasil penilaian dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan pada tahun pelaporan.

Capaian Skor IKPA adalah sebesar 97,43 atau mencapai 102,56% dari target 95, dengan rincian pada Tabel 3.7.5 dibawah.

Tabel 3.7.5 Realisasi skor IKPA unit kerja

No	Aspek	Skor
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran	95.11
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.99
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100.00
Skor Akhir		97.43

Perbandingan Skor IKPA tahun 2023 dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebagai berikut:



Dari Grafik di atas, Skor IKPA mengalami peningkatan sebesar 1,23 dari skor IKPA tahun 2022 dan telah mencapai 108,26% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 90.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain dikarenakan koordinator perencanaan telah memberikan target waktu yang cukup untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan revisi anggaran, bendahara telah secara tertib dalam melakukan penatausahaan keuangan, dan adanya dukungan pertanggungjawaban keuangan dari pelaksana kegiatan telah sesuai dan tepat waktu.

Rencana aksi ke depan untuk meningkatkan kinerja, yaitu dengan merumuskan proyeksi penarikan dana bulanan secara lebih cermat dan melaksanakan pelaporan output atas realisasi kegiatan secara lebih tertib.

7.7 NILAI PENGELOLAAN BMN UNIT KERJA

Indikator ini diukur berdasarkan Penilaian Mandiri (unit kerja) yang telah divalidasi oleh Biro Umum BPKP.

Capaian tahun 2023 sebesar 105,00 atau mencapai 131,25% dari target 80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7.6 Realisasi nilai pengelolaan BMN Unit Kerja

No	Indikator Penilaian	Realisasi
1.	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	100%
2.	Pengadaan	100%
3.	Penggunaan dan pemanfaatan	100%
4.	Pengamanan dan pemeliharaan	100%
5.	Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan	75%
6.	Penatausahaan	100%
7.	Pembinaan Pengawasan dan pengendalian	100%

Penggunaan Anggaran dan SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 2 layanan dan 38 unit atau sebanyak 100,00% dari target 2 layanan dan 38 unit. Dukungan realisasi dana sebesar Rp20.411.225.085,00 atau 99,27% dari anggaran Rp20.560.768.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 7.584 OH atau 100,00% dari rencana sebanyak 7.584 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 7 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 100,00% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,27%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 7 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 100,00% sama dengan dari capaian penggunaan SDM sebesar 100,00%.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sebesar Rp24.038.849.430,00 atau terserap 99,32% dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp24.202.813,00. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan mata anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	16.112.500.000	16.032.814.379	99,51
2.	Belanja Barang	7.387.728.000	7.303.724.884	98,86
3.	Belanja Modal	702.585.000	702.310.167	99,96
Jumlah		24.202.813.000	24.038.849.430	99,32

Tabel 3.8.2 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 Menurut Program/ Kegiatan

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Dukungan Manajemen			
1	Layanan Perkantoran	19.265.733.000	19.147.096.306	99,38
2	Layanan Umum	592.450.000	561.818.612	94,83
3	Layanan Sarana Internal	243.888.000	243.622.681	99,89
4	Layanan Prasarana Internal	458.697.000	458.687.486	100
Jumlah Program		20.560.768.000	20.411.225.085	99,27
II	Program Pengawasan Pembangunan			
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	879.328.000	878.022.664	99,85
2	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Tindak Lanjut	76.618.000	74.715.715	97,52
3	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara Daerah dan Desa	560.490.000	558.837.763	99,71
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	117.190.000	117.058.354	99,89
5	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	263.172.000	262.964.943	99,92
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	253.691.000	253.030.050	99,74
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	284.179.000	283.217.295	99,66
8	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	61.602.000	61.028.288	99,07
9	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	126.266.000	124.787.200	98,83
10	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	34.560.000	34.418.508	99,59
11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	864.769.000	859.598.104	99,40
12	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	120.180.000	119.945.461	99,80
Jumlah Program		3.642.045.000	3.627.624.345	99,60
Total Anggaran dan Realisasi		24.202.813.000	24.038.849.430	99,32

D. Kinerja Lainnya

Selain kinerja pengawasan dan dukungan pengawasan yang diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan kinerja lainnya, yang ditunjukkan dengan adanya:

Penghargaan Kinerja Implementasi Digipay



Atas inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan Implementasi Digipay, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendapat Piagam Penghargaan Terbaik III dalam Satuan Kinerja Terbaik dalam Implementasi Digipay di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Dukungan UMKM

Atas inovasi ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendapat Piagam Penghargaan dari Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan Kemenkeu Satu Mendukung UMKM Tumbuh Melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Maju.



Piagam Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Atas inovasi dan kolaborasi dalam Kinerja pelaksanaan Anggaran, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendapat Piagam Penghargaan Terbaik II atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 Kategori K/L Kecil (jumlah satker 1) lingkup Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan.

Piagam Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Atas inovasi dan kolaborasi dalam Kinerja pelaksanaan Anggaran, Gubernur Kalimantan Selatan memberikan Penghargaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendapat Piagam Penghargaan Terbaik II Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Negara/Lembaga Se- Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 untuk Kategori Kecil (Jumlah Satker 1).





BAB IV

Penutup

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja perwakilan dalam mencapai sasaran kegiatan tahun 2023, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja terhadap proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dalam upaya peningkatan pencapaian sasaran organisasi di masa mendatang.



Secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan realisasi Indikator Kinerja yang mencapai/ melebihi target sebanyak 32 indikator dari 35 indikator yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
Sasaran Kegiatan 1	IK 1 tercapai	114,85%
	IK 2 tercapai	49.567,94%
	IK 3 tercapai	111,12%
Sasaran Kegiatan 2	IK 1 tercapai	100,00%
	IK 2 tercapai	117,65%
	IK 3 tercapai	100,00%
Sasaran Kegiatan 3	IK 1 tercapai	120,00%
Sasaran Kegiatan 4	IK 1 tercapai	100,00%
	IK 2 tercapai	109,09%
	IK 3 tercapai	100,00%
	IK 4 tercapai	106,38%
	IK 5 tercapai	110,00%
Sasaran Kegiatan 5	IK 1 tercapai	100,00%
	IK 2 tercapai	117,65%
	IK 3 tercapai	100,00%
	IK 4 tercapai	100,00%
Sasaran Kegiatan 6	IK 1 tercapai	100,00%
	IK 2 tercapai	100,00%
	IK 3 tercapai	100,00%
	IK 4 tercapai	92,31%
	IK 5 tercapai	100,00%
	IK 6 tercapai	60,00%
	IK 7 tercapai	21,43%
	IK 8 tercapai	312,00%
	IK 9 tercapai	196,00%
	IK 10 tercapai	100,00%
	IK 11 tercapai	100,00%
	IK 12 tercapai	100,00%
Sasaran Kegiatan 7	IK 1 tercapai	112,89%
	IK 2 tercapai	101,28%
	IK 3 tercapai	137,47%
	IK 4 tercapai	100,00%
	IK 5 tercapai	114,36%
	IK 6 tercapai	102,56%
	IK 7 tercapai	131,25%

Meskipun begitu, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target. Hal ini merupakan tugas ke depan dalam memperbaiki kinerja yang belum tercapai dan sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja perwakilan yang telah tercapai.

Rencana Tindak Tahun 2024

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang terhadap Indikator Kinerja yang belum mencapai target, antara lain:

1. Mempertahankan faktor-faktor pendukung keberhasilan.
2. Memberikan atensi kepada Kepala Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada kinerja APIP Daerah.
3. Menjaga kepercayaan mitra kerja.
4. Memberikan rekomendasi yang bersifat strategis.
5. Melakukan pendampingan penyusunan roadmap kegiatan pengawasan APIP, penyusunan laporan keuangan BUMDes, dan pengelolaan risiko mitra kerja.
6. Meningkatkan kualitas SDM.
7. Meningkatkan metode pengawasan yang lebih efektif.
8. Mengembangkan penilaian risiko atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.

KILAS PERISTIWA



24 Januari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan dengan TPID Kabupaten Kotabaru



25 Januari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melantik Sub Koordinator Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga dan Kearsipan



26 Januari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menandatangani MoU pada High Level Meeting Peningkatan Kualitas pelaksanaan Anggaran Tahun 2023



27 Januari 2023

Penandatanganan Pakta Integritas Sebagai bentuk Komitmen Untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku



30 Januari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menjadi Narasumber pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah SIMDA FMIS di Lingkungan Kabupaten Banjar



30 Januari 2023

Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi menggelar FGD Entry Meeting Evaluasi Atas Akselerasi Sektor Kepariwisata Melalui Program Sungai Martapura Asri dan Pengendalian Pencemaran



31 Januari 2023

Kepala Perwakilan Menjadi Narasumber pada Sosialisasi Pengendalian di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sejahtera Mana Kejaksaan di Daerah



2 Februari 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memantau Harga Minyak Goreng di Pasaran



3 Februari 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Mengawal Penyakit dan Kuku



3 Februari 2023

Penandatanganan Komitmen Bersama penerapan, Peningkatan dan perbaikan Berkelanjutan Manajemen Risiko, Perencanaan dan penganggaran, Akuntabilitas Kinerja dan pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Banjar



3 Februari 2023

Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Melakukan Koordinasi dengan Seluruh Pemerintah Daerah terkait SPIP Terintegrasi



6 Februari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menjadi Narasumber Pada Rapat Koordinasi Tahunan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan



7 Februari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Koordinasi pada High Level Meeting Tim pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



8 Februari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi dan Kalimantan Selatan dan Tim Bidang Investigasi Melakukan Peninjauan Jembatan Mangkrak di Martapura



10 Februari 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terkait Pekerjaan Rehabilitasi Jalan



21 Februari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan membuka Workshop Pemantaafatan Digital Forensics dan Data Analytics APIP Inspektorat dan BPKP di Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah



23 Februari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Pada Join For Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemkab HST dengan BPKP Kalimantan Selatan



27 Februari 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Mengadakan Entry Meeting Program Sungai Martapura Asri



28 Februari 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Mengadakan Pelatihan Infografis Untuk Seluruh Pegawai



28 Februari 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Audit Tujuan Tertentu Dalam Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan



07 Maret 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Meraih Penghargaan Terbaik II Dalam Transaksi Digipay Atau Marketplace Tahun 2022 (Nilai Up Sedang)



8 Maret 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Mengawal Pengendalian Inflasi di Kabupaten Kotabaru



9 Maret 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Penilaian Risiko Program P3DN Bidang Kesehatan



20 Maret 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Vaksinasi Booster Kedua Untuk Meningkatkan Imunitas Pegawai



31 Maret 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Terkait Akselerasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan Hasil Pengawasan Atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024.



27 April 2023

Kepala Perwakilan Beserta Jajaran Berbagi Kepada Warga di Kabupaten Balangan



11 Mei 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menyelenggarakan "BPKP Goes To Campus" dalam Rangka HUT BPKP



16 Mei 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menyelenggarakan Donor Darah Dalam Rangka HUT BPKP



26 Mei 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Penandatanganan perjanjian (MoU) BPKP Kalsel dan Universitas Lambung Mangkurat Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



26 Mei 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Bersama Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Melakukan Penghijauan di Taman Hutan Raya Dalam Rangka HUT BPKP



9 Juni 2023

Kepala perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Penyusunan dan Finalisasi Rencana anggaran Biaya (RAB) dan Diskusi Pengelolaan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Daerah pada Pomnas XVIII Tahun 2023 di Kalimantan Selatan



19 Juni 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menyelenggarakan Cek Kesehatan dan Iva Untuk Seluruh Pegawai



20 Juni 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Evaluasi Kinerja dan GRCC Terhadap Bank Kalsel



20 Juni 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Raih Meraih Juara 2 Lomba Sintesa Hasil Pengawasan Dalam Rangka HUT BPKP Ke-40.



21 Juni 2023

Kepala perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Focus Group Discussion dan Diseminasi program P3DN melalui Keisnergian Pengawasan Kolaboratif Atas Kinerja Program P3DN di Kabupaten Banjar



12 Juli 2023

Kepala perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Program P3DN Melalui Penguatan UMKM



13 Juli 2023

Kepala perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Seminar Nasional Hari Bhakti Adhyaksa ke 63



20 Juli 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah



22 Agustus 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Penandatanganan Komitmen Kepala Daerah Kabupaten Tapin



22 Agustus 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menerima Penghargaan Terbaik II Kuasa Pengguna Anggaran Semester I Tahun 2023



29 Agustus 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Pada Acara Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan di Kabupaten Tabalong



31 Agustus 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menjadi Narasumber Pada Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2022/2023 di Lingkungan Polda Kalsel



5 September 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menyerahkan Penghargaan Untuk PDAM Tabalong



11 September 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Pada Sosialisasi dan Ekspose Pemutakhiran NJOP/ZNT PBB-P2



11 September 2023

Pelantikan Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah



14 September 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menerima Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 1 tahun 2023



15 September 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menyelenggarakan Latihan Pemadaman Kebakaran.



16 September 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Meraih Peringkat 3 Dalam Implementasi Digipay Tahun 2022



19 September 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Pada Asistensi dan Sosialisasi CMSP serta Penatausahaan KKPD.



29 September 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Koordinasi ke PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan



11 Oktober 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menjadi narasumber Pada Sosialisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat Dalam Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Sosial



20 Oktober 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menerima Piagam Penghargaan Selatan Menerima Piagam Penghargaan Perencanaan program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu



23 Oktober 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Membuka Diklat Audit Ketaatan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.



24 Oktober 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menjadi Narasumber Workshop Penguatan Akuntabilitas dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023



1 November 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menerima Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024



2 November 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Mengikuti Rapat Koordinasi Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan



3 November 2023

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Membuka Diklat Pengelolaan Indeks berbasis Risiko Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan



14 November 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Monitoring Inflasi dan Cadangan makanan



15 November 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan Observasi Pembangunan Pengendali Banjir



16 November 2023

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Dalam Rapat Tindak Lanjut Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLM)



16 November 2023

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Menjadi Narasumber Pada Bimbingan Teknis Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Bagi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten HSS



21 November 2023

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Memberikan Arahan Pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023



23 November 2023

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Bimbingan Teknis Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan



18 Desember 2023

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Menyerahkan Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah



20 Desember 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Menjadi Narasumber Pada Sosialisasi Pencegahan Korupsi Bagi Pembakal dan Perangkat Desa Se Kabupaten Banjar

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



**BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Jend. A. Yani Km 32,5 Banjarbaru 70711
Telp: 0511-4781116 Fax: 0511-4774501

www.bpkp.go.id

Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja. dan Target 2020 – 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi (jutaan rupiah)	300	750	1.000	1.500	2.000
	Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi (jutaan rupiah)	108	259	324	388	453
	Nilai potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)	500	1.000	1.500	2.000	2.500
	Nilai potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)	216	432	540	647	755
	Nilai efisiensi pengeluaran pemerintah daerah (jutaan rupiah)	-	185.428	152.978	134.621	111.062
	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah (jutaan rupiah)	1.123	1.351	1.509	1.649	1.868
	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah (jutaan rupiah)	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
	Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer	-	118	120	122	125
	Nilai penyelamatan pembiayaan daerah	-	59	60	61	62
Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional dan Daerah	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	0	2	0	0	0
	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	7	7	7	7	7
	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	7	7	7	7	7
	Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target	0	1	1	1	1
	Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik	0,00%	25,00%	31,25%	37,50%	50,00%
	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	75%	80%	85%	85%	85%
Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0	0	0	1	3
	Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	17,65%
	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	10	10	11	11	12

Lampiran 1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	43,48%	43,48%	47,83%	47,83%	52,17%
	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	1	2	2	2	2
	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	3,23%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%
	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	0	31	38	47	53
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil Pengawasan refresif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	0	0	2	3	4
	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	0	0	0	1	2
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern pada Pemda dan Badan Usaha	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	6	8	10	12	13
	Persentase APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	42,86%	57%	71%	86%	93%
	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	14	14	14	14	14
	Persentase Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	1	1
	Persentase Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	0%	0%	0%	100,00%	100,00%
	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	1	3	4	5	7
	Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	7,69%	23,08%	30,77%	38,46%	53,85%
	Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	0,55%	1,48%	2,21%	2,58%	2,58%
	Jumlah rekomendasi strategis (policy brief) kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1
Persentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa	40%	44,99%	50,03%	55,01%	60%	

Lampiran 1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset secara memadai	0	37	92	197	418
	Jumlah APIP yang mengimplementasikan aplikasi Siswaskeudes	1	3	4	6	6
	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	0	1
	Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	0	0	1	1	3
	Persentase BUMD dengan MRI \geq Level 3	0,00%	0,00%	5,88%	5,88%	17,65%
	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	0	0	2	3	4
	Persentase BLUD dengan MRI \geq Level 3	0,00%	0,00%	12,50%	18,75%	25,00%
	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0	0	0	1	3
	Persentase BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	17,63%
	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0	0	0	0	1
	Persentase BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Nilai Skor Zona Integritas	75	76	77	78	79
	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyusunan RKA tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran	86	87	88	89	90
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90%	91%	92%	93%	95%
	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai pengelolaan BMN	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Nilai implementasi SAKIP	80	81	82	83	84
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	Indeks Manajemen Risiko	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

Lampiran 1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks kepuasan layanan ketatausahaan	70	76	80	81	82
	Indeks kepuasan layanan Perwakilan BPKP	70	73	76	80	81

Target dan Realisasi Outcome

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KINERJA TAHUN 2023				KEUANGAN			SDM (OH)		
				SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	33.682,75	38.685,41	114,85						
		1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	5.513,66	2.733.007,70	49.567,94						
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	42.465,64	47.187,07	111,12						
							560.490.000,00	558.837.763,00	99,71	10.343	10.313	99,71	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis	1,00	1,00	100,00						
		2.2	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	% (Persen)	85,00	100,00	117,65						
		2.3	Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	2,00	100,00						
							126.266.000,00	124.787.200,00	98,83	1.187	1.187	100,00	
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	% (Persen)	80,00	96,00	120,00						
							1.818.590.000,00						

Lampiran 2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KINERJA TAHUN 2023				KEUANGAN			SDM (OH)		
				SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENCAN A	REALISAS I	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1,00	1,00	100,00						
		4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11,00	12,00	109,09						
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	3,00	3,00	100,00						
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	47,00	50,00	106,38						
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	10,00	11,00	110,00						
								117.190.000,00	117.058.354,00	99,89	1.433	1.433	100,00
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindak lanjuti	% (Persen)	100,00	100,00	100,00						
		5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindak lanjuti	% (Persen)	85,00	100,00	117,65						
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	3,00	3,00	100,00						

Lampiran 2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KINERJA TAHUN 2023				KEUANGAN			SDM (OH)		
				SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENCAN A	REALISAS I	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha	1,00	1,00	100,00						
								34.560.000,00	34.418.508,00	99,59	1.904	1.904	100,00
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00						
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Pemkab /Kota	11,00	11,00	100,00						
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >=Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00						
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >=Level 3	Pemkab /Kota	13,00	12,00	92,31						
		6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI >=Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00						
		6.6	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI >=Level 3	Pemkab /Kota	5,00	3,00	60,00						
		6.7	Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	14,00	3,00	21,43						

Lampiran 2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KINERJA TAHUN 2023				KEUANGAN			SDM (OH)		
				SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENCAN A	REALISAS I	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00	78,00	312,00						
		6.9	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	49,00	196,00						
		6.10	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	1,00	1,00	100,00						
		6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	4,00	4,00	100,00						
		6.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >=Level 3	BLU/D	2,00	2,00	100,00						
								984.949.000,00	979.543.565,00	99,45	8.016	7.973	99,46
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	84,67	112,89						
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	83,05	101,28						
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	% (Persen)	70,00	96,23	137,47						
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	% (Persen)	100,00	100,00	100,00						
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	85,77	114,36						

Lampiran 2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KINERJA TAHUN 2023				KEUANGAN			SDM (OH)		
				SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENCAN A	REALISAS I	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	97,43	102,56						
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	105,00	131,25						
								20.560.768.000,00	20.411.225.085,00	99,27	7.584	7.584	100,00

Perbandingan Kinerja Outcome

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KINERJA IKK									
			SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	Naik (turun)	CAPAIAN 2023 (%)	CAPAIAN 2022 (%)	Naik (turun)	TARGET AKHIR 2024	% REALISASI DARI TAHUN 2024	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	38.685,41	3.324,00	35.361,35	114,85	444,37	(332,52)	453,00	8539,83
		1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	2.733.007,70	627.606,90	2.105.400,79	49.567,94%	216,06	335,46%	112.930,00	2.420,09%.
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	47.187,07	25.019.096,16	(24.971.909,09)	111,12	92663,32	(92552,20)	52.149,00	90,49
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis	1,00	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
		2.2	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	% (Persen)	100,00	100,00	0,00	117,65	100,00	17,65	85,00	117,65
		2.3	Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	0,00	7,00	28,57
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	% (Persen)	96,00	100,00	(4,00)	120,00	125,00	(5,00)	NA	NA
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1,00	NA	NA	100,00	NA	NA	3	33,33
		4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	12,00	12,00	0,00	109,09	109,09	0,00	12	100,00
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	3,00	3,00	0,00	100,00	150,00	(50,00)	2	150,00
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	50,00	52,00	(2,00)	106,38	136,84	(30,46)	53	94,34
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	11,00	3,00	8,00	110,00	100,00	10,00	NA	NA

Lampiran 3

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KINERJA IKK									
			SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	Naik (turun)	CAPAIAN 2023 (%)	CAPAIAN 2022 (%)	Naik (turun)	TARGET AKHIR 2024	% REALISASI DARI TAHUN 2024	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	% (Persen)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100	100,00
		5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	% (Persen)	100,00	100,00	0,00	117,65	100,00	17,65	90	111,11
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	3,00	1,00	2,00	100,00	50,00	50,00	4	75,00
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha	1,00	NA	NA	100,00	NA	NA	2	50,00
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00	13,00	92,31
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Pemkab/Kota	11,00	6,00	5,00	100,00	85,71	14,29	13,00	92,31
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >=Level 3	Provinsi	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00	14,00	92,86
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >=Level 3	Pemkab/Kota	12,00	12,00	0,00	92,31	100,00	(7,69)	14,00	92,86
		6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI >=Level 3	Provinsi	1,00	NA	NA	100,00	NA	NA	1,00	100,00
		6.6	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI >=Level 3	Pemkab/Kota	3,00	1,00	2,00	60,00	33,33	26,67	7,00	42,86
		6.7	Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	3,00	3,00	0,00	21,43	75,00	(53,57)	2,58	830,56
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	78,00	20,00	58,00	312,00	100,00	212,00	NA	NA
		6.9	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	49,00	29,00	20,00	196,00	145,00	51,00	418	11,72
		6.10	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00	3	33,33
		6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	4,00	2,00	2,00	100,00	100,00	0,00	4	100,00
		6.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >=Level 3	BLU/D	2,00	NA	NA	100,00	NA	NA	1	200,00

Lampiran 3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KINERJA IKK							TARGET AKHIR 2024	% REALISASI DARI TAHUN 2024
				SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	Naik (turun)	CAPAIAN 2023 (%)	CAPAIAN 2022 (%)	Naik (turun)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	84,67	84,60	0,07	112,89	112,80	0,09	79	107,18
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	83,05	87,75	(4,70)	101,28	107,01	(5,73)	84	98,87
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	% (Persen)	96,23	77,19	19,04	137,47	90,68	46,79	Level 4	137,47
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	% (Persen)	100,00	100,00	0,00	100,00	100	0,00	Level 4	100,00
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	85,77	92,25	(6,48)	114,36	123	(8,64)	81	105,89
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	97,43	96,20	1,23	102,56	101,26	1,3	90	108,26
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	105,00	104,72	0,28	131,25	143,99	32,29	Baik	131,25

Lampiran 4

Rincian Target dan Realiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target

No	Kode Cluster	Nama Cluster	Kode PSN	Nama PSN	Lokasi	Rendal	Unit Pelaksana Pengawasan	Target	Realisasi	% Fisik
1	X	-	X.209.8	PLTU Kalselteng 2, 2 x 100 MW	Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	D4	PW16	96,55%	98,40%	98,40%

Lampiran 5

Rincian Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beserta tingkat kesehatan/kinerja

No	Nama Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah	Indikator Capaian Kinerja		Indikator Capaian Tata Kelola		Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI		
		Skor	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RSD Idaman Kota Banjarbaru					3,025	3	Terdefinisi	3,000	3	<i>Delivered</i>
2	RSUD Balangan Kabupaten Balangan	80	Sangat Baik	80	Sangat Baik						
3	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin	78	Baik	39	Kurang	3,025	3	Terdefinisi	3,000	3	<i>Delivered</i>
4	RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut					3,02	3	Terdefinisi			
5	RSUD Ratu Zalecha Kabupaten Banjar					3,2425	3	Terdefinisi			
6	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	81	Sangat Baik	71	Baik						

Lampiran 6

Rincian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta tingkat kesehatan/kinerja dan predikatnya

No	Nama Badan Usaha Milik Daerah	Indikator Kementerian PUPR		Indikator Kemendagri		Kapabilitas SPI		
		Skor	Tingkat Kesehatan	Skor	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PDAM Balangan	2,85	Sehat	61,81	Baik			
2	PDAM Barito Kuala	2,91	Sehat	58,78	Cukup			
3	PDAM Hulu Sungai Utara	3,06	Sehat	60,05	Baik			
4	PDAM Kotabaru	3,17	Sehat	59,63	Cukup			
5	PDAM Tanah Bumbu	3,01	Sehat	59,23	Cukup			
6	PDAM Tapin	3,56	Sehat	67,46	Baik			
7	PTAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	3,81	Sehat	70,80	Baik	2	2	Level 2 dengan catatan
8	PTAM Hulu Sungai Tengah	3,15	Sehat	59,99	Cukup			
9	PTAM Intan Banjar	3,14	Sehat	66,10	Baik			
10	PTAM Kabupaten Tanah Laut	3,32	Sehat	58,36	Cukup			
11	PTAM Tabalong	3,74	Sehat	64,16	Baik	2	2	Level 2 dengan catatan
12	PTAM Tirta Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,53	Sehat	63,90	Baik			

Lampiran 7

Rincian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah menyusun Laporan Keuangan

No	Kecamatan	Desa	Nama BUM Desa	Laporan Keuangan
1	Aluh-Aluh	Bakambat	Berkah Pesisir	Ya
2	Astambul	Tambak Danau	Padi Mas	Ya
3	Astambul	Pingaran Ulu	Sumber Rezeki	Ya
4	Astambul	Benua Anyar ST	Sumber Makmur	Ya
5	Astambul	Sungai Tuan Ilir	Maju Mandiri GMT	Ya
6	Astambul	Kelampaian Tengah	Mitra Baru	Ya
7	Astambul	Jati Baru	Jabar Mandiri	Ya
8	Astambul	Sungai Tuan Ulu	Hayati	Ya
9	Astambul	Sungai Alat	Berkat Abadi	Ya
10	Astambul	Benua anyar sungai tuan	Sumber makmur	Ya
11	Beruntung Baru	Salat Makmur	Bumdes Makmur Sejahtera	Ya
12	Cintapuri Darussalam	Sindang Jaya	Jaya Bersama	Ya
13	Cintapuri Darussalam	Karya Makmur	Berkah Utama	Ya
14	Gambut	Malintang	Barokah	Ya
15	Karang Intan	Sungai Alang	Berkat Bersama	Ya
16	Karang Intan	Sungai Asam	Karya Mandiri	Ya
17	Karang Intan	Awang Bangkal Timur	Palawangan	Ya
18	Karang Intan	Pasar Lama	Harapan Masa	Ya
19	Karang Intan	Jingah Habang Hilir	Bauntung	Ya
20	Karang Intan	Abirau	Karya Bersama	Ya
21	Karang Intan	Awang Bangkal Barat	Putra Bulu	Ya
22	Karang Intan	Penyambaran	Karya Utama Baru	Ya
23	Karang Intan	Sungai Landas	Berkat Mufakat	Ya
24	Karang Intan	Mandiingin Barat	Bina Bersama	Ya
25	Kertak Hanyar	Simpang Empat	Harapan Kita	Ya
26	Kertak Hanyar	Mekar Raya	Mekar berseri	Ya

Lampiran 7

No	Kecamatan	Desa	Nama BUM Desa	Laporan Keuangan
27	Martapura	Murung kenanga	Al ikhwan	Ya
28	Martapura	Tambak baru	Berkatusaha tambakbaru	Ya
29	Martapura	Pasayangan Selatan	Berlian	Ya
30	Martapura	Tungkaran	Barokah	Ya
31	Martapura Barat	Penggalaman	Bumdes Bersyukur	Ya
32	Martapura Barat	Keliling Benteng Tengah	Sejahtera	Ya
33	Martapura Timur	Pekauman	Berkat Guru	Ya
34	Martapura Timur	Akar bagantung	Mufakat bersama	Ya
35	Mataraman	Gunung Ulin	Karya Bakti	Ya
36	Mataraman	Takuti	Sejahtera Abadi	Ya
37	Mataraman	Bawahan Selan	BUMDesa Makmur Bersama	Ya
38	Matarman	Bawahan Sebrang	Usaha Bersama	Ya
39	Sambung Makmur	Sungai Lurus	Berkat Harapan	Ya
40	Simpang Empat	Paku	Usaha Mandiri	Ya
41	Simpang Empat	Lok Cantung	BUMDesa Barokah Bina Bersama	Ya
42	Simpang empat	Sungai langsung	Berkat bersama Sungai langsung	Ya
43	Sungai Pinang	Belimbing Baru	Maju Bersama	Ya
44	Sungai Tabuk	Sungai Bakung	Bakung Lestari	Ya
45	Sungai Tabuk	Pembantanan	Maju Bersama	Ya
46	Sungai Tabuk	Pejambuan	Pandan Sari	Ya
47	Sungai Tabuk	Keliling Benteng Ilir	Benteng Kirana	Ya
48	Tatah Makmur	Jaruju	Barakat	Ya
49	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	Karya Baimbai	Ya
50	Telaga Bauntung	Telaga Baru	Karya Banta	Ya

Lampiran 8

Rincian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah Memberikan Kontribusi BUM Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa

No	Kecamatan	Desa	Nama BUM Desa	Kontribusi PADesa			Jumlah
				2020	2021	2022	
1	Karang Intan	Sungai Alang	Berkat Bersama	Rp1.284.000,00	Rp3.345.350,00	Rp8.612.600,00	Rp13.241.950,00
2	Karang Intan	Sungai Asam	Karya Mandiri	Rp5.000.000,00	Rp5.550.000,00	Rp2.600.000,00	Rp13.150.000,00
3	Karang Intan	Mandiingin Barat	Bina Bersama	Rp1.965.000,00	Rp1.838.100,00	Rp1.851.900,00	Rp5.655.000,00
4	Kertak Hanyar	Simpang Empat	Harapan Kita	Rp0,00	Rp2.487.000,00	Rp2.335.000,00	Rp4.822.000,00
5	Martapura	Pasayangan Selatan	Berlian	Rp4.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp8.500.000,00	Rp19.000.000,00
6	Martapura	Tungkaran	Barokah	Rp6.328.900,00	Rp0,00	Rp2.594.960,00	Rp8.923.860,00
7	Martapura Barat	Sungai Rangas Tengah	Bina Sejahtera	Rp3.195.000,00	Rp2.299.650,00	Rp3.340.700,00	Rp8.835.350,00
8	Sungai Tabuk	Sungai Bakung	Bakung Lestari	Rp900.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.335.350,00	Rp4.235.350,00
9	Sungai Tabuk	Tajau Landung	Tajau Landung Mandiri	Rp7.879.500,00	Rp7.806.000,00	Rp4.473.525,00	Rp20.159.025,00
10	Telaga Bauntung	Rantau Bujur	Usaha Maju Bersama	Rp0,00	Rp1.046.600,00	Rp1.402.300,00	Rp2.448.900,00
11	Telaga Bauntung	Telaga Baru	Karya Banta	Rp10.635.000,00	Rp11.238.205,00	Rp815.000,00	Rp22.688.205,00

Lampiran 9

Rincian Kualitas Tata Kelola Pemda Provinsi

No	Nama Provinsi	SPIP			Kapabilitas APIP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kalimantan Selatan	3,129	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,063	3	Terdefinisi	2,830	2	Berkembang

Rincian Kualitas Tata Kelola Pemda Kabupaten Kota

No	Nama Pemerintah Daerah	SPIP			Kapabilitas APIP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Provinsi Kalimantan Selatan	3,129	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,063	3	Terdefinisi	2,830	2	Berkembang
2	Kabupaten Balangan	3,202	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,951	2	Berkembang	2,980	2	Berkembang
3	Kabupaten Banjar	3,262	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,950	2	Berkembang	2,940	2	Berkembang
4	Kabupaten Barito Kuala	3,429	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,768	2	Berkembang	2,600	2	Berkembang
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,554	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,438	3	Terdefinisi	3,090	3	Terdefinisi
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2,980	2	Berkembang	3,00	3	Delivered	2,883	2	Berkembang	3,020	3	Terdefinisi
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,260	3	Terdefinisi	2,81	2	Structured	2,925	2	Berkembang	2,790	2	Berkembang
8	Kabupaten Kotabaru	3,436	3	Terdefinisi	2,81	2	Structured	2,876	2	Berkembang	2,430	2	Berkembang
9	Kabupaten Tabalong	3,099	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,532	2	Berkembang	2,930	2	Berkembang
10	Kabupaten Tanah Bumbu	3,205	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,606	2	Berkembang	2,740	2	Berkembang
11	Kabupaten Tanah Laut	3,035	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,800	2	Berkembang	2,900	2	Berkembang
12	Kabupaten Tapin	3,013	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,738	2	Berkembang	2,900	2	Berkembang
13	Kota Banjarbaru	3,165	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,069	3	Terdefinisi	2,900	2	Berkembang
14	Kota Banjarmasin	3,152	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,004	3	Terdefinisi	3,020	3	Terdefinisi